

ABSTRAK

Pada masa sekarang ini metode komunikasi semakin berkembang di masyarakat. Hal tersebut memudahkan setiap manusia untuk mengakses dan memungkinkan bagi mereka untuk dapat menyampaikan segala pendapat baik positif dan negatif. Penyampaian yang digunakan yaitu mural atau sering dikenal yaitu dengan sebutan *street art*, yang biasanya hasil karya tersebut banyak terdapat pada tempat dan fasilitas umum. Keberadaan *street art* tersebut tidak lepas dari pro dan kontra penggunaan ruang publik atau fasilitas umum tanpa izin. Seni visual jalanan yang dimana tidak mempunyai izin resmi dalam pembuatannya dapat dikategorikan sebagai tindakan vandalisme yang memiliki dampak negatif. Perbuatan vandalisme dalam bentuk mural yang bermuatan kritik sosial tidak hanya dijumpai di Indonesia, di Negara-negara dunia pun banyak dijumpai yang melakukan perbuatan tersebut, salah satunya yaitu di Negara Malaysia. Di-era berkembangnya dunia, aksi *street art* yang digunakan dalam penyampaian pesan salah satunya paling marak saat ini dengan melakukan vandalisme dalam bentuk mural yang bermuatan kritik sosial. Dimana perbuatan tersebut menjadi salah satu bentuk penyampaian aspirasi dan kritik untuk kondisi yang bertolak belakang dengan masyarakat Indonesia, namun perbuatan dalam penyampainnya dinilai merusak. Dengan perbuatan tersebut maka telah terjadi permasalahan dimana menyampaikan aspirasi dan pendapat dilindungi oleh perundang-undangan namun disisi lain perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak seharusnya.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang dengan cara melihat, membaca, dan juga bisa melalui penelusuran media internet, *website*, jurnal, artikel, serta surat kabar yang berhubungan dengan pengaturan perbuatan vandalisme dalam bentuk mural yang bermuatan kritik sosial di Negara Indonesia dan Malaysia. Keseluruhan data yang diperoleh dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Pertama, meskipun mural yang bermuatan kritik sosial mempunyai perlindungan hukum namun jika dilakukan tanpa mendapat izin, maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan vandalisme yang mana dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan perbuatan tersebut berdampak pada fasilitas umum yang mengurangi nilai kegunaannya. Dan yang kedua yaitu bahwa peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan dan perbedaan, persamaan antara lain jenis sanksi, dan pengkualifikasian tindak pidana vandalisme dan perbedaannya dari bobot sanksi, dan jenis perundang-undangan yang mana di Negara Malaysia telah mempunyai Undang-undang khusus terkait vandalisme namun di Negara Indonesia belum mempunyai undang-undang khusus tersebut.

Kata Kunci: Komparatif, Vandalisme, Mural, Kritik Sosial.

ABSTRACT

At this time the method of communication is growing in society. This makes it easier for every human being to access and support them to be able to express all opinions, both positive and negative. The submissions used are murals or what is often known as street art, which are usually found in public places and facilities. The existence of street art cannot be separated from the pros and cons of using public spaces or public facilities without permission. Street visual art that does not have an official permit in its production can be categorized as an act of vandalism that has a negative impact. Vandalism acts in the form of murals published in social criticism are not only found in Indonesia, in many countries around the world there are also those who commit acts, one of which is in Malaysia. In the era of the developing world, street art acts that are used to convey messages are one of the most prevalent nowadays by carrying out vandalism in the form of murals containing social criticism. Where the act is a form of conveying aspirations and criticism for conditions that are contrary to the Indonesian people, but the actions in the presentation are considered destructive. With these actions, there have been problems where expressing aspirations and opinions are protected by law but on the other hand the act is carried out in a way that is not supposed to.

This research is a normative research using a law approach and a comparative approach. The data used are primary data and secondary data by viewing, reading, and also through internet media searches, websites, journals, articles, and newspapers related to the regulation of vandalism in the form of murals containing social criticism in the State of Indonesia and Malaysia. The overall data obtained were analyzed descriptively qualitatively.

From the research conducted, the following results were obtained: First, although murals published in social criticism have legal protection, if they are carried out without obtaining permission, then the act is an act of vandalism which can be qualified as a criminal act because it has fulfilled the elements of a criminal act and these actions have an impact on public facilities which reduce their usefulness value. And the second is that the laws and regulations in the sanctioned country of Indonesia and Malaysia have similarities and differences, similarities between other types, and the qualifications for the crime of vandalism and the difference between the weights of sanctions, and which laws and regulations in Malaysia have laws there is a special law related to vandalism but in the State of Indonesia there is no such special law.

Keywords: Comparative, Vandalism, Mural, Social Criticism.